

# TURUNKAN BIAYA SEKOLAH SWASTA!

## WALI KOTA: PEMKO SUDAH BERI GURU INSENTIF

TIM BATAM POS, Batam Kota

Setiap tahun ajaran baru, para orangtua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri. Mereka beralasan, sekolah negeri biayanya lebih murah, sedangkan di sekolah swasta sangat mahal. Tak heran, setiap kali pembukaan Pendaftaran Peserta Di-

dik Baru (PPDB) selalu membeludak.

Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri, Wali Kota Batam Muhammad Rudi minta sumbangsih sekolah-sekolah swasta dengan menurunkan iuran atau biaya bagi peserta didik baru.

■ Baca **TURUNKAN...** Hal 13

## 21.067 Murid SD Ikut USBN

**SEKUPANG (BP)** - Sebanyak 21.067 murid sekolah dasar (SD) sederajat akan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada 3-5 Mei 2018 mendatang.

Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam

Raden Azmin mengatakan, ada tiga mata pelajaran yang akan diujikan pada USBN nanti, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

■ Baca **21.067...** Hal 13



Kami sudah bantu insentif gurunya, masa tak mau turunkan biaya sekolah. Turunkanlah!"

**MUHAMMAD RUDI**  
Wali Kota Batam



F. CECEP MULYANA/BP

# Turunkan Biaya Sekolah Swasta!

Sambungan dari hal 9

Rudi beralasan, selama ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah membantu melalui pemberian insentif terhadap guru-guru di semua sekolah swasta.

"Kami sudah bantu insentif gurunya, masa tak mau turunkan biaya sekolah. Turunkanlah!" kata Rudi di Kantor DPRD Batam, Kamis (26/4) siang. Apalagi, sambungannya, memang pemberian insentif tersebut bertujuan agar biaya di sekolah swasta tidak terlalu mahal. "Jadi, kalau murah, anak-anak kita mau (sekolah) ke swasta," jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini masyarakat selalu ngotor untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena biaya di sekolah swasta mahal. Untuk itu, Pemko Batam sedang mempersiapkan jadwal pertemuan dengan yayasan-yayasan sekolah swasta untuk membicarakan masalah ini. "Salah satu poinnya soal biaya masuk dan biaya bulanan di sekolah swasta yang mahal," ucapnya.

Diakui Rudi, sejauh ini memang ada beberapa sekolah swasta masih kekurangan murid. Itu karena para orangtua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri. "Jadi, kalau siswa diambil semua sama sekolah negeri, tutup nanti swasta," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada persoalan daya tampung sekolah di Batam jika anak-anak ada yang ke swasta. "Intinya, daya tampung sekolah di Batam cukup, asal ditambah (sekolah) swasta tentunya," terangnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihalohe mengharapkan Kepala Disdik Batam dan Wali Kota Batam sesegera mengagendakan pertemuan dengan pengelola sekolah swasta se-Batam untuk dibuat MoU. Dimana intinya sekolah swasta harus mau memberikan dispensasi atau keringanan ke anak-anak yang tak tertampung sekolah di negeri. Misal dengan mengurangi biaya pendaftaran masuk sekolah ataupun mengurangi biaya uang gedung.

Sebab, lanjut Udin, selama ini Pemko Batam sudah berkontribusi banyak terhadap keberadaan sekolah swasta seperti mengalokasikan dana untuk insentif guru-guru swasta. "Pemko Batam sudah mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta dari APBD. Belum lagi dari APBN seperti dana BOS," terangnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna laporan reses di DPRD Batam kemarin, Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan di beberapa wilayah di Batam masih butuh

Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk menampung siswa baru.

"Terutama untuk pendidikan dasar. Jika dibandingkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk Batam, kita masih butuh SMA, SMP, Sekolah Luar Biasa untuk siswa berkebutuhan khusus, bahkan SD," paparkan Anggota Fraksi Golkar Ides Maudi dalam laporannya.

Menyikapi itu, Rudi mengatakan pembangunan sekolah sudah masuk dalam program kerja Pemko Batam, baik untuk tahun 2018 maupun 2019 mendatang. Ia memastikan, walau pihaknya sedang gesit membangun infrastruktur jalan, tak berarti meninggalkan tugas yang lain di sektor pendidikan, kesehatan maupun penanganan kemiskinan.

"Pendidikan diperlukan untuk Sumber Daya Manusia. Jadi, tak hanya infrastruktur. Saya kembangkan infrastruktur hari ini tapi tak mengurangi jatah yang lain," ucapnya.

## Sekolah Swasta Menolak

Sementara itu, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPPS) Batam Heri Supriyadi mengatakan berat bagi swasta untuk menurunkan biaya. Sebab akan berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta. Juga berimbas pada mutu pendidikan. Padahal peran sekolah swasta bagi pendidikan cukup besar.

"Mau diturunin apalagi. Kalau biaya turun bagaimana kami akan berikan kesejahteraan guru dan meningkatkan mutu layanan pendidikan," ungkap Heri.

Ia mengungkapkan persoalan di sekolah negeri dan sekolah swasta berbeda. Jika sekolah negeri seluruh kesejahteraan pendidik ditanggung pemerintah, namun di swasta murni dari uang sekolah. Ia mencontohkan, jika satu orang siswa uang sekolahnya Rp 300 ribu hingga Rp 550 ribu (standar) per bulan, butuh lebih kurang tujuh atau lebih pembayaran dari siswa untuk menggaji satu guru.

"Kalau bicara insentif itu kan hanya tambahan. Masalahnya gaji guru, sepenuhnya sekolah yang tanggung uang sekolah," sebutnya.

Apalagi, sambungannya, kini kesejahteraan pendidik di sekolah swasta memprihatinkan. Tak heran banyak guru di sekolah swasta digaji jauh dari kata layak. Bahasa lainnya jauh di bawah upah minimum kota (UMK).

"Bisa dicek, guru kami bahkan ada yang gajinya di bawah Rp 2 juta per bulan. Kami punya datanya. Beban di sekolah swasta itu tertinggi biaya pega-

wai, sekitar 70 sampai 80 persen dari total biaya pendidikan," jelasnya.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang baik. Maka, Heri menilai, mestinya yang dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan kesetaraan antara swasta dan negeri berbasis anggaran. "Negeri sudah dibantu gedung, guru, dan sarana lain. Sementara swasta? Semuanya ditanggung sendiri pihak sekolah," tuturnya.

## Zonasi Masih Dibahas

Terlepas dari persoalan daya tampung, persoalan tak kalah mendesak jelang PPDB adalah penetapan zonasi. Sebab, sistem PPDB tahun ini wajib menggunakan sistem zonasi.

Di beberapa wilayah, pembahasan zonasi sudah dimulai dengan melibatkan pihak kecamatan. Salah satunya di Sagulung. Camat Sagulung Reza Khadafi mengatakan belum bisa menyimpulkan pemetaan zonasi yang dibahas bersama kepala sekolah, Rabu (26/4) lalu. Dalam rapat pertama tersebut dia telah meminta lurah untuk membantu pihak sekolah dalam merumuskan zonasi di masing-masing wilayah mereka.

"Ini kan baru tahap awal, jadi masih membahas penerapan zonasi dulu," kata dia, kemarin.

Dia mengharapkan kepala sekolah bisa menyiapkan data terkait daya tampung masing-masing sekolah. Sehingga pihaknya bersama perangkat lurah hingga RT/RW bisa membantu. "Yang sering jadi masalah itu kan daya tampung. Jadi, saya inginnya sekolah kasih kami data, sehingga pemetaan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Seperti diketahui, jumlah sekolah di Kecamatan Sagulung cukup minim, terlebih untuk SMP dan SMA. Kecamatan terpadat di Batam ini memiliki sekolah jenjang SMP dan SMA tak lebih dari 10 sekolah. Padahal siswa yang ingin mendaftar ada ribuan. "Setiap tahun jumlahnya sekitar 3.000 anak. Dan itu bertambah setiap tahun," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Batam Fadhelipa mengakui persoalan PPDB tiap tahun memang belum bisa terurai. Setiap tahun selalu ribut. Maka untuk menghindari hal itu, ia meminta seluruh kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk lurah dan RT/RW untuk segera memetakan wilayah tempat tinggal siswa. (une/gas/adl/mta)

# H

## Pem

BAT  
Kota  
Rudi  
pulka  
pangk  
tuk m  
biaya  
setiap  
gabu  
"Se  
pata  
Nanti  
untuk  
dihaj  
Rudi  
Me  
pang  
tarif  
Penj

# W

tes  
dio  
"Un  
keta  
bah  
Se  
tan  
me  
teru  
wila  
did  
ang  
"Ap  
dio  
bar  
anc  
Se  
Uta  
ga  
yan  
gata  
akti  
per  
Ind  
"D  
per  
ter

# 2

S  
ny  
ba  
ha  
"T  
s

# 21.067 Murid SD Ikuti USBN

*Sambungan dari hal 9*

Selain itu, Disdik juga menyiapkan jadwal ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir saat ujian berlangsung. "Mana tahu ada yang kurang sehat, jadi mereka bisa ikut

ujian susulan. Jadwalnya 7-9 Mei," sebutnya.

Saat ini persiapan pelaksanaan ujian sudah berjalan 90 persen dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan ujian yang telah dijadwalkan. Ia berharap seluruh siswa bisa mengerjakan

ujian dengan baik dan memperoleh nilai memuaskan, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Meskipun USBN bukan lagi penentu kelulusan, para murid diimbau tetap fokus se-

lama ujian. Sebelumnya seluruh murid sudah menjalani pemantapan. Tahun ini, terdapat 21.067 peserta ujian tingkat SD, terdiri 11.818 murid dari SD negeri, 8.153 murid SD swasta, 241 MI negeri dan 855 murid MI swasta. (yui)

## Aplikasi Pendaftaran Online Disempurnakan

BATUAJI (BP) - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam terus membenahi layanan pendaftaran *online* untuk pasien rawat jalan. Terakhir, manajemen RSUD berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk meng-*input* data kependudukan warga Batam dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendukung jaringan dan aplikasi *online* tersebut.

"Semuanya dilakukan bertahap. Penyempurnaan tetap dilakukan secara bertahap dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait," ujar Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Ani Dewiyana, kemarin.

Saat ini, layanan pendaftaran *online* itu sudah berjalan. Pasien yang ingin berobat di RSUD sudah bisa menggunakan aplikasi *online* untuk mendaftar, seperti lewat *Short Message Service* (SMS), *WhatsApp* (WA) dan juga *website* RSUD Embung Fatimah. Namun kendala-kendala teknis sebagai langkah permulaan tetap ada. Antara lain, belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya aplikasi tersebut. "Tapi kami optimistis ini akan berjalan dengan baik nantinya," kata Ani.

Karena masih tahap awal, layanan aplikasi daftar *online* itu hanya bisa dilayani di jam kerja saja. Sebab membalas pesan masih dilakukan secara manual oleh petugas. Ke depannya layanan aplikasi *online* itu berlangsung sepanjang hari atau 24 jam. "Sekarang belum bisa karena operator masih terbatas," ujarnya.

Pantauan *Batam Pos* di hari keempat setelah aplikasi daftar *online* dijalankan, masih belum maksimal. Banyak pasien yang masih menggunakan jalur manual untuk mendaftar. (eja)

# Hapus Uang Masuk Pangkalan

## Pemko Undang Pengelola Pangkalan Taksi se-Batam

**BATAM KOTA (BP)** - Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan segera mengumpulkan seluruh pengelola pangkalan taksi di Batam untuk membahas penghapusan biaya yang dibebankan pada setiap kendaraan saat bergabung di suatu pangkalan.

"Seluruh (sopir taksi) titik pangkalan akan kami panggil. Nanti pembayaran atau biaya untuk gabung pangkalan akan dihapus, dihilangkan," kata Rudi, Kamis (26/4).

Menurutnya, persoalan biaya pangkalan ini akan membuat tarif taksi konvensional mahal. Penghapusan tarif masuk

pangkalan tersebut jika dihapus, tentu akan memberikan sumbangsih terhadap tarif angkutan taksi konvensional turun.

"Supaya nanti imbang sama (taksi) *online*. Jadi, kalau sudah imbang nanti, orang pasti tak ribut lagi," terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan, Dishub akan mendata terlebih dahulu titik-titik pangkalan yang tersebar di wilayah Batam. Yusfa mengatakan, biaya masuk pangkalan tidak masuk dalam regulasi yang dibuat pemerintah, tetapi lebih pada

kesepakatan yang terjadi antara sopir taksi konvensional.

"Tarif itu sebenarnya tidak masalah sepanjang tak berimplikasi pada penumpang. Tetapi kalau akibat iuran tersebut menyebabkan tarif ke pelanggan (mahal) itu yang tak boleh," terang Yusfa.

Dia mengungkapkan, salah satu masalah yang terjadi sekarang di lapangan adalah penetapan tarif yang dilakukan secara pribadi tanpa mempertimbangkan argo. "Tarif ditentukan sendiri, itu yang tak boleh. Harusnya sesuai argo. Penetapan argo berdasarkan penghitungan BOK (Biaya

Operasional Kendaraan)," jelasnya.

Di sisi lain, kata Yusfa, tarif murah pada angkutan taksi *online* mulai diprotes oleh sopir taksi *online* sendiri. Penyebabnya, karena daya tarik menjadi sopir taksi *online* sejatinya bukan masalah tarif, melainkan bonus yang ditawarkan pemilik aplikasi.

"Kalau berdasarkan tarif, rugi *driver*-nya. Menariknya karena ada bonusnya. Di Jakarta sudah terjadi tuntutan *driver online* agar tarif (taksi *online*) naik," ungkapnya. (adi)

# Kasus Pencurian Ikan Masih Tinggi

## DOKUMENTASI



F. BP BATAM UNTUK BATAM POS

PROSES pemusnahan arsip milik BP Batam di Gudang Logistik di Sekupang, Kamis (26/4).

## BP Musnahkan Arsip Berusia 36 Tahun

SEKUPANG (BP) - Sebanyak 20.274 arsip milik Badan Pengusahaan (BP) Batam sejak tahun 1971 hingga 2007, dimusnahkan di Gudang Logistik BP Batam di Sekupang, Kamis (26/4).

## 4 Bulan, 10 Kasus Ditangani PSDKP Batam

EUSEBIUS SARA, Sagulung

PANGKALAN Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam di Jembatan II Bareleng menangani sepuluh kasus *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal sepanjang 2018 ini. Umumnya yang melakukan aktivitas ilegal itu kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam di perairan Natuna.

Kasi Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Batam, Syamsu menjelaskan sepuluh kasus *illegal fishing* itu terdiri dari enam kasus yang melibatkan KIA asal Vietnam dan dua kasus yang melibatkan Kapal Ikan Indonesia (KII).

"Untuk kapal yang melakukan *illegal fishing* sebenarnya ada enam, empat dari Vietnam, dua Indonesia. Cuma dalam

pengembangan ternyata empat KIA asal Vietnam ini ditemukan terkait empat kasus lain," tutur Syamsu, Kamis (26/4).

Dari sepuluh kasus tersebut, total tersangka yang diamankan untuk diproses lebih lanjut ada 10 orang. Terdiri dari nakhoda dan awak kapal. "Saat ini lagi dalam proses persidangan semua, termasuk kapal-kapal bermasalah itu," ujar Syamsu.

Untuk KII, permasalahan yang dijumpai karena menggunakan alat tangkap *trawl* atau yang lazim disebut pukat yang sangat dilarang oleh pemerintah. Alat tangkap tersebut dianggap merusak ekosistem laut mulai dari terumbu karang hingga benih-benih ikan kecil yang terjaring pukat.

"Jaringnya sangat kecil. Semuanya diangkut termasuk

terumbu karang. Itu kan merusak ekosistem laut," kata Syamsu.

Sementara untuk KIA, sambung Syamsu tentu tidak memiliki izin penangkapan ikan yang sah sebagai nelayan asing.

"Kalau sudah tak sah tentu sangat berbahaya bagi ekosistem laut kita. Bukan hanya hasil laut (ikan) yang dikuras, tapi terumbu karang dan lain sebagainya juga hancur," ujarnya.

Sebagai data perbandingan, jumlah tangkapan ataupun penanganan kasus sepanjang tahun 2018 ini memang belum ada perubahan apapun dari tahun sebelumnya. Artinya, angka pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kepri masih cukup tinggi.

"Karena data perbandingan dengan tahun 2017 masih hampir sama jumlah pengungkapan rata-rata per bulannya," kata



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

KAPAL ikan tangkapan PSDKP Batam sandar di Dermaga PSDKP di Jembatan II Bareleng, Kamis (26/4).

Syamsu.

Untuk menekan angka pencurian ikan dan merusak ekosistem laut tersebut, Kasi Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam Kapten Martin Lahulima menuturkan, perlu adanya peran aktif dari semua elemen masyarakat khususnya

para nelayan untuk sama-sama menjaga wilayah perairan Indonesia.

"Aparat penegak hukum memang ada, tapi masyarakat sendiri harus peran aktif. Lihat aktifitas ilegal seperti itu harus berani lapor secepat mungkin ke petugas," ujarnya.\*\*\*

## L. Liar Bukit Senyum Terbakar

# Hapus Denda PBB Pakai Perwako

RENGGA YULIANDRA, Batam Kota

**PRO** dan kontra penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesasaan (PBB-P2) diutarakan kalangan legislatif. Ada yang sepakat karena bakal meringankan beban masyarakat, ada juga yang tidak setuju karena belum ada pembahasan dengan dewan.

"Itu bisa saja dilakukan. Kalau memang mengacu pada kepatuhan masyarakat bayar PBB-P2 menjadi baik, sah-sah saja disepakati," ujar anggota Komisi III DPRD Batam Werton Panggabean, Kamis (26/4).

Menurutnya, penghapusan denda ini harus diatur dengan Peraturan Wali Kota (Perwako). Harapannya, masyarakat yang memiliki denda bertahun-tahun hanya diwajibkan membayar utang pokok PBB-P2.

"Memang belum ada pembahasan ke arah sana. Tapi kalau memang tujuannya memperlancar dan mengangkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, saya kira sah-sah saja wali kota mengusulkan penghapusan denda PBB-P2," sebut Werton.

Sementara itu, anggota Komisi II Dandis Rajagukguk

mengakui banyaknya denda PBB-P2 tidak lepas dari kurangnya sosialisasi wajib pajak kepada masyarakat. Menurut dia, denda PBB-P2 tidak mesti dihapuskan jika tidak terlalu besar. Katakanlah satu rumah membayar Rp 76 ribu-Rp 90 ribu setahun.

"Sebenarnya bukan masalah didenda, saya pikir sosialisasi kepatuhan ini yang kurang. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, serta menunda bertahun-tahun hingga menjadi denda," sebut Dandis.

Sebagai warga negara yang baik, lanjut dia, tentu ada hak

dan kewajiban. Jika ini dihapuskan bakal menjadi pembodohan. Bisa saja nanti ketika ada kendala pemerintah daerah kembali mengambil cara penghapusan denda.

"Terus terang secara pribadi saya kurang sepakat jika ini dihapus. Walaupun itu dijadikan alasan untuk merangsang masyarakat bayar PBB-P2. Saya pikir bukan itu, kemudahan pelayanan mesti dilakukan," jelasnya.

Pelayanan yang dimaksud, yakni bagaimana masyarakat tidak perlu antre lagi membayar, loket pembayaran tidak di satu tempat, mudah diakses

masyarakat serta waktu yang relatif cepat. "Kalau bisa setiap kelurahan ada loket pembayaran, tentu ini akan mempermudah masyarakat untuk membayar PBB-P2," beber politikus PDIP itu.

Terkait pertanggungjawaban anggaran jika dihapus, kata Dandis, sepenuhnya menjadi tanggung jawab wali kota.

"Kalau memang dikeluarkan perwako, tanggung jawab mereka lah. Yang jelas kita tak pernah bahas," tegasnya.

Sebelumnya, Pemko Batam mempersiapkan rencana penghapusan denda PBB-P2. Insentif ini sedang dibahas di

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam.

Kepala BP2RD Batam Raja Azmanzyah menyebutkan yang akan dihapus yakni denda PBB-P2 medio 1994 hingga 2010. Tujuannya, mempermudah pemerintah menjaring piutang dari jenis pajak itu. "Kami merangsang ini untuk menggali piutang pajak," ucap Raja.

Sementara denda dihapus, ia menegaskan pokok piutang tetap akan ditagih. "Dendanya nanti juga ada yang hanya didiskon 25 persen hingga 100 persen," paparnya.\*\*\*



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

Werton Panggabean